

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS

(Case Study On Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian)

SITI NUR AZLINA

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.

email: sitinurazlina08@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze and describe the implementation of the principles of good governance in particular local governments Dinas Koperasi Usaha kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Data collection is done through interviews, observations, and documentation. The research method used is descriptive-qualitative. The data obtained are financial statements Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan, dan Perindustrian 2018 year.

The results of this study indicate that the principles, namely: Participation, Accountability, Transparency, Value for money (economy, obligation, and justice) publish financial information and website procurement. On the principle of accountability, the agency has held a forum for accountability to the public, and has made financial reports that meet the elements of the completeness and regularity of documents. In the principle of participation, the community participates in overseeing the performance of the government by actively participating in development planning activities, especially in the economic sector in improving the standard of living of the community in the industrial sector. In the Transparency Principle, the agency has carried out the responsibility of mutual information disclosure between the fields of the Value For Money Principle, the better the financial management that is carried out by the regional finances, the better the quality of the financial statements.

Keywords: Analysis of the Implementation, of the Principles of Good Governance, Regional Government Financial Reports.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip Good Governance pada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Koperasi Usaha kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Data yang diperoleh adalah Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan, dan Perindustrian Tahun 2018.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada prinsip yaitu: Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, Value for money (ekonomi, Kewajiban, dan Keadilan) mempublikasikan informasi keuangan serta pengadaan website. Pada prinsip akuntabilitas, instansi telah mengadakan forum pertanggung jawaban kepada masyarakat, serta telah membuat laporan keuangan yang memenuhi unsur kelengkapan dan keteraturan dokumen. Pada prinsip partisipasi, masyarakat turut mengawasi kinerja pemerintah dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan terutama dibidang ekonomi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dibidang industri. Pada Prinsip Transparansi instansi telah melaksanakan tanggung jawab saling keterbukaan informasi antar bidang Prinsip Value For money semakin baik pengelolaan keuangan yang di lakukan keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Analisis Implementasi, Prinsip-Prinsip Good Governance, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1. PENDAHULUAN

Fakta yang terlihat sebagai bukti lemahnya penerapan *Good Governance* adalah terjadinya kasus-kasus korupsi yang terbilang tinggi, perekonomian yang dimiliki Indonesia merupakan ekonomi berbasis pasar, dimana pemerintah yang memiliki peranan penting (Ristanti : 2014). Pendapat lainnya dikemukakan oleh OECD dan World Bank bahwa : “*Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dan investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan

Masalah Dalam hal ini adalah ditemui para pejabat menggunakan uang rakyat disaat masa kampanye yaitu mantan Sekretaris Daerah dan Bendaharannya sebesar Rp.1.520.000.000,00 sehingga berdampak kerugian Negara terhadap kas daerah informasi berdasarkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Dalam hal ini tentu akan berdampak terhadap pengelolaan keuangan pemerintah terutama dinas di ruang lingkup Kabupaten Kuantan Singingi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian..

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang analisis implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan ditinjau dari Prinsip Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, *Value For Money* diantaranya yaitu. Penelitian Andira (2012) dengan lokasi penelitian di UPTD Pendidikan Makasar yaitu prinsip partisipasi masyarakat sudah aktif dalam penyampaian aspirasi mereka dengan program-program yang dilaksanakan, baik itu perencanaan, penyiapan, maupun pengawasan. Nii Made Asih Ristiani (2014) yang melakukan penelitian di SKPD Kabupaten Tambanan. Hasil penelitian ini dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa semua prinsip *Good Governance* termasuk prinsip transparansi sudah diterapkan dengan baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dari penelitian Nii Made Asih Ristiani (2014) yang melakukan penelitian di SKPD Kabupaten Tambanan bahwa Prinsip akuntabilitas dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa masyarakat diberikan hak untuk mengakses dan mengkritik terkait pengelolaan keuangan. Dalam penelitian Andira (2012) dengan lokasi penelitian di UPTD Pendidikan Makasar menyebutkan bahwa prinsip *value for money* (ekonomi, efisiensi dan efektivitas) sudah diterapkan karena mengutamakan mewujudkan visi dan misi apabila tidak terwujud maka rancangan akan di revisi kembali

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian *Good Governance*

Good Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik dan *Economic Governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup (Mardiasmo, 2018 : 31).

2.1.2 Implementasi

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap matang. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky dalam (Nurdin, 2004 : 70).

2.1.3 Sejarah Good Governance di Indonesia

Trianingsih (2007) menambahkan bahwa munculnya konsep *Good Governance* di Indonesia sebagai reaksi atas perilaku pengelolaan perusahaan yang tidak memperhitungkan *stakeholder*-nya. Hal ini terlihat jelas ketika krisis terjadi di Indonesia sejak Tahun 1997. Krisis tersebut memberi pelajaran berharga bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata tidak didukung struktur ekonomi yang kokoh. Hampir semua pengusaha menjalankan roda bisnis dengan manajemen yang tidak baik dan syarat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Good Governance

Dari prinsip-prinsip tersebut maka paling tidak terdapat beberapa hal yang bisa diterapkan untuk mengetahui kualitas laporan keuangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2007 tentang pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari prinsip-prinsip tersebut maka paling tidak terdapat beberapa hal yang bisa diterapkan untuk mengetahui kualitas laporan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi
2. Transparansi
3. Akuntabilitas
4. *Value for money*

2.1.5 Kepuasan Pelayanan Publik

2.1.5.1 Kepuasan Pelayan Publik

Kepuasan Pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik (Rahmayanty, 2010:96).

2.1.5.2 Pelayanan Publik

Pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Apabila masyarakat tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas atau tidak efisien dalam (Hardiansyah, 2011 : 36).

2.1.6 Equity atau Keadilan

Adalah pelayanan publik yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek pemerataan. Kemudian Lenvinne dalam (Ratminto, 2006 : 175) mengemukakan teori *Responsiveness, Responsibility, Accountability*.

2.1.7 Akuntabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

2.1.8 Transparansi

Menurut Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, azas keterbukaan/transparansi dalam penyelenggaraan adalah azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

2.1.9 Karakteristik Laporan Keuangan

(IAI, 2002 :7) Agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik berikut :

1. Relevansi

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Selain itu, suatu informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap.

2. Keandalan

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi

3. Dapat dibandingkan .

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.10 Laporan Keuangan

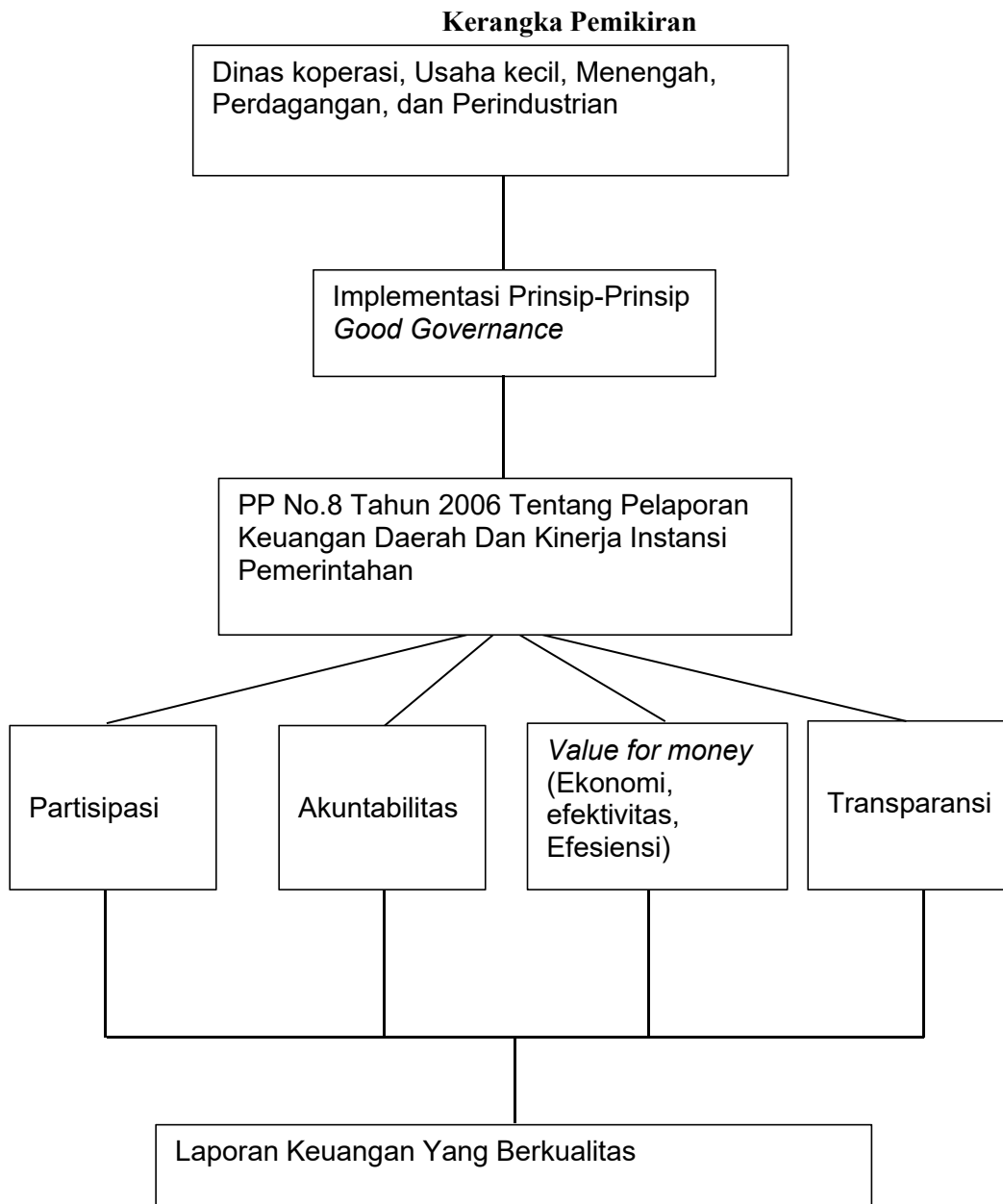
Dalam (Nunuy 2010 :13) Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP terdiri dari Laporan Realisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.11 Pengertian Devisit / Surplus

Devisit atau Surplus anggaran yaitu selisih antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah. *Devisit* anggaran terjadi apabila pengeluaran pemerintah lebih besar dari pada penerimaan pemerintah, dalam hal ini pengeluaran lebih rutin dan lebih besar dari tabungan yang dimiliki pemerintah. Sedangkan *Surplus* merupakan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama karena surplus terjadi apabila jumlah pendapatan lebih besar dari pada jumlah belanja.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode tersebut adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok, manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Untuk itu peneliti akan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki yang menggambarkan Penerapan *Good Governance* pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Tabel
Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Item Pertanyaan
1	Partisipasi (<i>Participation</i>)	PP No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Daerah Dan Kinerja Instansi Pemerintahan yaitu pada: Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang prosedur pengelolaan keuangan daerah, patisipasi memakai kata partisipatif, keikut sertaan dan ketelibatan, serta kebebasan berasosiasi dalam penganggaran.	1. Keikut sertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan terhadap kualitas laporan keuangan 2. Partisipasi masyarakat Kebebasan masyarakat berasosiasi dalam penganggaran terhadap kualitas laporan keuangan
2	Transparansi (<i>Transparency</i>)	PP No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Daerah Dan Kinerja Instansi Pemerintahan yaitu pada: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 4 ayat 7 dikatakan transparan yaitu Prinsip keterbukaan mendapatkan akses keuangan daerah seluas-luasnya, kebebasan informasi	1. Keterbukaan dalam mendapatkan akses keuangan daerah seluas-luasnya terhadap kualitas laporan keuangan 2. Kebebasan dalam memperoleh informasi terhadap kualitas laporan keuangan
3	Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Daerah Dan Kinerja Instansi Pemerintahan yaitu pada Undang-Undang Nomor. 32 Tahun tentang pemerintah daerah, Pertanggung jawaban akhir Anggaran yaitu pertanggung jawaban APBD, pertanggung jawaban akhir masa jabatan, pertanggung jawaban hal tertentu (Tindak Pidana), Pramenter Kinerja, tolak	1. Pertanggung jawaban akhir Anggaran yaitu pertanggung jawaban APBD terhadap kualitas laporan Keuangan. 2. Pertanggung jawaban akhir masa jabatan, pertanggung jawaban hal tertentu (Tindak Pidana), Pramenter Kinerja, tolak ukur objektif, tata cara yang terukur terhadap kualitas laporan keuangan.

		ukur objektif, tata cara yang terukur.	
4	<i>Value for money</i> (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas)	PP No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Daerah Dan Kinerja Instansi Pemerintahan Peraturan Daerah Kabupaten Kuntan Singingi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Di dalamnya terdapat pemerataan ekonomi, kehidupan demokrasi yang semakin maju dan keadilan, serta ada hubungan yang sesuai dengan pusat daerah	1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang didalamnya terdapat pemerataan ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Kehidupan demokrasi dan keadilan yang semakin maju sehingga cipta hubungan yang sesuai dengan Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan

3.2 *Teknik Analisis Data*

Berikut ini merupakan langkah-langkah peneliti dalam melakukan analisis data penelitian, yaitu:

1. Mendiskripsikan karakteristik narasumber
2. Membandingkan teori dengan informasi yang diperoleh narasumber
3. Menarik kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat. Peneliti masih harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti.

3.3 *Pengecekan Validitas Data*

Untuk menguji dan memeriksa keabsahan data yang diperoleh pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik penelitian kualitatif mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan kualitatif (Moleong, 2007 : 320). Salah satu teknik yaitu Teknik triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda teknik triangulasi yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil pengamatan.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan pemerintah
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dukumen yang berkaitan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan

Berdasarkan indikator yang mempengaruhi analisis , kerangka pemikiran menjadi acuan dalam menilai penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi. Dilihat dari hasil penjelasan indikator prinsip-prinsip *Good Governance* adalah sebagai berikut:

4.1.1 Prinsip Partisipasi Pada Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan, Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi

Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan PP No.8 Tahun 2006 dan Mardiasmo menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat melalui Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis yang disediakan melalui kotak saran, untuk keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan dan penganggaran partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan serta penyusunan laporan keuangan secara partisipatif dan konsultasi untuk menyelesaikan isu. Selain itu pembangunan yang dimaksud disini yaitu menggerakkan masyarakat dalam penegmbangan industri dengan tujuan meningkatkan tarap hidup masyarakat yang lebih maju dan kreatif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Andira (2012) dengan lokasi penelitian di UPTD Pendidikan Makasar yaitu masyarakat sudah aktif dalam penyampaian aspirasi mereka dengan program-program yang dilaksanakan, baikitu perencanaan, penyiapan, maupun pengawasan.

4.1.2 Prinsip Transparansi (Transparancy) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singigi

Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan pendapat Mardiasmo PP Nomor. 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2006 karena Tugas di kerjakan sudah diimplementasikan sesuai dengan tanggung jawab bidang masing-masing untuk pencapaian pegawai yang jujur Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Maka jelas Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian sudah menerapkan dengan baik, dengan mempublikasikan informasinya melalui media cetak yaitu berupa brosur telah disediakan dan juga banner dimana banner tersebut khusus untuk masyarakat yang datang, dengan tujuan memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat serta memberikan informasi terkait alur penyerahan dan pengambilan berkas pelayanan. Dengan demikian masyarat lebih mudah memperoleh informasi. Nii Made Asih Ristiani (2014) yang melakukan penelitian di SKPD Kabupaten Tambanan. hasil penelitian ini dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa semua prinsip *Good Governance* sudah diterapkan dengan baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

4.4.2 Prinsip Akuntabilitas pada Dinas Koprasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian kabupaten Kuantan Singingi

PP Nomor. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Daerah Dan Kinerja Instansi Pemerintahan dan didukung oleh Peraturan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun tentang pemerintah daerah, Pertanggung jawaban akhir Anggaran yaitu pertanggung jawaban APBD, pertanggung jawaban akhir masa jabatan, pertanggung jawaban hal tertentu (Tindak Pidana), Pramerit Kinerja, tolak ukur objektif, tata cara yang terukur.

Kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem dan pelaksanaan serta pertanggung jawaban organisasi, mutlak diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan organisasi secara efektif. Suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh *stakeholders*, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat (Mardiasmo, 2018 : 33). Kewajiban organisasi yang terkait dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya.

Dari hasil penelitian menunjukkan pelaksanaannya sudah sesuai penerapannya dengan teori dan peraturan karena diterapkan SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2018, tanggung jawab yang di percayakan organisasi kepadanya adalah dasar Akuntabilitas organisasi Laporan keuangan yang disampaikan atas pertanggung jawaban BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundangan-Undangan, memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tentunya pada laporan keuangan tersebut tersedia informasi yang relevan Dan tanggung jawab yang dijalankan sesuai dengan bidang masing-masing dikerjakan berdasarkan peraturan yang berlaku serta waktu yang ditetapkan agar terciptanya manusia yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari penelitian Nii Made Asih Ristiani (2014) yang melakukan penelitian di SKPD Kabupaten Tambanan dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa masyarakat diberikan hak untuk mengakses dan mengkritik terkait pengelolaan keuangan.

4.4.4 Prinsip Value For Money (Ekonomi, Efisiensi, Dan Efektivitas) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2018. Didalamnya terdapat pemerataan ekonomi, kehidupan demokrasi yang semakin maju dan keadilan, serta ada hubungan yang sesuai dengan pusat daerah.

Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang sesuai antara pusat daerah, serta antar daerah (Mardiasmo, 2018 : 33).

Hasil penelitian sudah sesuai dengan teori yang dapat dilihat dari opini yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan yang diperiksa. Semakin baik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan, Dengan pemaparan LKPD, menunjukkan akuntabilitas semakin baik dan telah

dilaksanakannya *Good Governance*. Sedangkan perolehan opini selain menunjukkan rendahnya akuntabilitas dan belum terlaksananya *Good Governance*.

Dalam penelitian Andira (2012) dengan lokasi penelitian di UPTD Pendidikan Makasar menyebutkan bahwa prinsip *value for money* (ekonomi, efisiensi dan efektivitas) sudah diterapkan karena mengutamakan mewujudkan visi dan misi apabila tidak terwujud maka rancangan akan di revisi kembali.

5. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Singingi, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Dari segi prinsip Partisipasi (*Participation*) implementasi prinsip-prinsip *Good Governace* terhadap kualitas Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah di implementasikan dengan sangat baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Daerah Dan Kinerja Instansi Pemerintahan karena masyarakat melalui perencanaan dan penganggaran partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan serta penyusunan laporan keuangan secara partisipatif dan konsultasi untuk menyelesaikan isu. Selain itu pembangunan yang dimaksud disini yaitu menggerakkan masyarakat dalam penegmbangan industri dengan tujuan meningkatkan tarap hidup masyarakat yang lebih maju dan kreatif.
2. Dari segi prinsip Transparansi (*Transparancy*) implementasi prinsip-prinsip Good governace terhadap kualitas Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah di implementasikan dengan sangat baik, sesuai dengan tujuan Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Daerah Dan Kinerja Instansi Pemerintahan. Kerena instansi memperhatikan kebutuhan *stakeholder* dalam memperoleh informasi mempublikasikan informasinya melalui berbagai media
3. Dari segi prinsip akuntabilitas (*accountability*) implementasi prinsip-prinsip Good governace terhadap kualitas Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah di implementasikan dengan sangat baik sesuai dengan tujuan PP Nomor. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Daerah Dan Kinerja Instansi Pemerintahan. Karena instansi. Karena Laporan keuangan yang disampaikan atas pertanggung jawaban BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundangan-Undangan, memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tentunya pada laporan keuangan tersebut tersedia informasi yang relevan Dan tanggung jawab.
4. Dari segi prinsip *Value for money* (ekonomi, efisiensi dan efektivitas) implementasi prinsip-prinsip Good governace terhadap kualitas Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah di implementasikan dengan sangat baik. Sesuai dengan tujuan Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Daerah Dan Kinerja Instansi Pemerintahan karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimaksudkan sudah memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan telah mematuhi standar akuntansi pemerintahan, peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa pula peneliti ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan dalam setiap langkah dan tindakan kita sebagai seorang muslim. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang amat besar kepada:

1. **Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Zul Ammar, SE., ME** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus pembimbing I yang telah banyak membantu dalam meluangkan waktu serta memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan pemecahan masalah kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak **Yul Emri Yulis, SE., M.Si** selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak **M. Irwan, SE.,MM** selaku dosen penasehat akademis yang telah banyak membantu memberi arahan serta petunjuk dalam perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar, yang telah mendidik penulis selama perkuliahan, karyawan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singig. Terimakasih atas bantuannya.
6. Bapak **Drs. AZHAR, MM** selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian. Yang telah memberikan kesempatan serta waktunya dalam memberikan informasi kepada penulis
7. Ibu **Hj. Yusnaningsih, S,Pd** selaku Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi yang telah bersedia dalam memberikan informasi yang penulis perlukan.
8. Ibu **Kristina Handayani, SE** selaku bendahara terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas bantuan dan kerja samanya yang telah banyak membantu dalam mendapatkan data serta informasi yang penulis perlukan hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak **Herry, SE** selaku kasubag program dan keuangan, seluruh Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan.
10. Kedua orang tua tercinta ayahnda alm **Lukman** dan Ibunda **Irda Yulita** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, selalu mendukung dan memotivasi anak-anaknya, semoga penulis mampu menjadi apa yang mereka harapkan.
11. Adikku **Arsa Rafadilla** yang selalu memberikan kebahagiaan sehingga membuat penulis sangat termotivasi untuk segera menyelesaikan jenjang pendidikan ini.
12. Teristimewa penulis persembahkan rasa cinta dan terima kasih sedalam dalamnya kepada **Nuzul Arki**, yang begitu setia menemani tanpa ada keluh kesah dan memberikan dukungan moril maupun materi kepada penulis dalam mendampingi penulis selama ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Serta Keluarga **Sukarmini Yunius, Kak Eti Yunarni Putri, Kak Laily Nazmi, bang Nasrun,**

Bang **Wahyudi Sinanga**, Terimakasih telah banyak membantu penulis, memotivasi dengan memberi dukungan yang luar biasa.

13. Sahabat-sahabat **Monika kartika dewi, Elen FN, Ratna Lusiani, Aprilia Sudarsih, Rinda Gustiara Nanda, Indri Wulandari** yang selalu setia memberikan dukungan kepada penulis.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti, bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Faisal, Sanapiah. 2008. *Format - format Penelitian Sosial*. Jakarta.

Hardiyansyah. 2011. *Kualitas pelayanan publik konsep dimensi indikator dan implementasinya*. Yogyakarta : Gava media.

Khawaja, Sarfraz. 2011. *Good governance and result based monitoring*. PhD. University of Missouri (USA)

Mardiasmo. 2018. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah Edisi Terbaru*. Yogyakarta : Penerbit CV. Andi

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit Remaja Rosdakarya

Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada

Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi : Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Penerbit PT Rineka Cipta

Sarundajang. 2005. *Babak baru Sistim pemerintahan*. Jakarta : Penerbit Kata Hasta Pustaka

Sedarmayanti. 2012. *Good Governnce & Good Corperate Governance*. Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju

Sugiono. 2010. *Metode Penetian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Penerbit Elfabeta

Sulistiyani, Ambar T. 2011. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media

Jurnal dan Hasil Penelitian :

Andira Ayu. 2012. *Analisis Implementasi Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT. UNITED TRACTORS TBK. Cabang Makasar*. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin Makasar.

Afiah ,Nurnunuy. 2010. *Akuntansi Pemerintahan Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Kencana

- Astriandy, Christo. 2018 Analisis Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Yogyakarta : Sanata Dharma
- Herianto, Anas. 2012 Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Triharjo Kecamatan Saleman Kabupaten Saleman.
- Chairunisa, Irna .2014. Pengaruh Implentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan *Good Governance*. Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya
- Depi, Oktia, Ruspina. 2013. Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan *Good Governance*.
- Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Gayatri, Ida Ayu Sri .2013. Pengaruh *Coperate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan *Laverge* Terhadap Integritas Laporan Keuangan
- Iraamelia, Nurazlina.2014. Pengaruh *Good Governance* Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Fakultas Ekonomi UNRI
- Melisa, OliviaMamarimbing 2015. Pembangunan Fisik Desa (Studi Di Desa Tateliiii Kec.Mandolang)
- Pratiwi, siti hardianti dharma. 2017. Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Desa Nepo. MAKASSAR : Universitas Hasanudin
- Putu, Rita Saftarini. 2015. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal , Asimetri Informasi Dan Implementasi *Good Governance* Terhadap Kecendrungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Studi Empiris Pada SKPD Di Kabupaten Bangli.
- Ristani, Asih Made Ni. 2014. Pengaruh Sitem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan *Good Governance* Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan

Dokumen-Dokumen:

- Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.
- Renstra Dinas koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi
- MENPAN No. 25/2004 Adalah Hasil Pendapat Dan Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Yang Diberikan Aparatur Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Bupati Nomor. 9 Tahun 2009 Tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Partisipasi Memakai Kata Partisipatif.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 4 ayat 7
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Pada

Pasal 10 Ayat (2) Yang Menyatakan Penerapan SAP Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah Paling Lambat Mulai Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Daerah Dan Kinerja Instansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Yang Menggunakan Basis AkruaI Diterbitkannya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (8) Menyatakan Bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.

Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Dan Pengelolaan Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/Walikota Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Berupa Laporan Keuangan Yang Telah Di Audit BPK.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Akuntabilitas